# ABSTRAK

**SALAPUDIN, NPM : 2022383** Judul Skripsi "**IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERILAKU MEROKOK SAAT MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KOTA AMUNTAI)**" dibawah bimbingan **Ibu Sri Agusmila Herlinda, S.Pd, M.AP.** sebagai pembimbing I dan **Bapak Selamat Riadi, S.Sos, M.AP.** sebagai pembimbing II.

Merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor merupakan perilaku yang masih banyak dijumpai di Kota Amuntai, meskipun Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan setiap pengemudi berkendara dengan penuh konsentrasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, rendahnya sosialisasi mengenai larangan tersebut, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggarannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi undang-undang dimaksud beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Kajian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima belas informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*, terdiri atas personel Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara, pengendara kendaraan bermotor, dan masyarakat pengguna jalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Kota Amuntai tergolong kurang terimplementasi diukur melalui model George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020) dilihat dari Indikator Sosialisasi kurang terimplementasi, Kejelasan kurang terimplementasi, Konsistensi kurang terimplementasi, Sumber Daya Manusia kurang terimplementasi, Informasi cukup terimplementasi, Wewenang kurang terimplementasi, Fasilitas cukup terimplementasi, Sikap Para Pelaksana kurang terimplementasi, Pengaturan Birokrasi sudah terimplementasi, Insentif kurang terimplementasi, SOP Penindakan Pelanggaran sudah terimplementasi, Fragmentasi (Pembagian Tanggung Jawab) sudah terimplementasi. Faktor pendukung konsistensi memberikan himbauan pada para pengguna jalan dan adanya peraturan yang melarang merokok sambil berkendara. Faktor penghambat kurangnya sosialisasi tentang aturan larangan merokok saat berkendara, fasilitas yang kurang memadai dalam pengawasan pelanggaran, dan tidak ada penilangan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan pada seluruh variabel agar dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, disarankan agar Sat Lantas Polres Hulu Sungai Utara meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum secara konsisten, masyarakat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta pemerintah mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengawasan lalu lintas demi keselamatan berlalu lintas di Kota Amuntai.

# ABSTRACT

**SALAPUDIN, NPM : 2022383 Thesis Title "IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERING ROAD TRAFFIC AND TRASNPORTATION RELATED TO SMOKING BEHAVIOR WHILE DRIVING MOTOR VEHICLES (A CASE STUDY IN AMUNTAI CITY)",** supervised by **Mrs. Sri Agusmila Herlinda, S.Pd., M.AP.** as Supervisor I and **Mr. Selamat Riadi, S.Sos., M.AP.** as Supervisor II.

Smoking while driving a motor vehicle remains a common practice in Amuntai City, even though Article 106 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation requires every driver to operate a vehicle with full concentration. This condition reflects a gap between legal provisions and practices in the field, a lack of socialization regarding the prohibition, and suboptimal law enforcement against such violations. Based on these issues, this study aims to examine the implementation of the law and the factors influencing it.

This study is analyzed using George C. Edward III's policy implementation theory, which comprises four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research employs a qualitative approach with a descriptive qualitative type, aimed at providing a comprehensive and systematic depiction of the phenomenon under study. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving fifteen informants selected using purposive sampling, consisting of personnel from the Traffic Unit of the Hulu Sungai Utara Police Resort, motor vehicle drivers, and road users.

The results of the study indicate that the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Road Transportation related to smoking while driving motor vehicles in Amuntai City is less than optimally implemented, as measured using the George C. Edwards III model as cited in Leo Agustino (2020). This is reflected in the following indicators: socialization is less optimally implemented, clarity is less optimally implemented, consistency is less optimally implemented, human resources are less optimally implemented, information is sufficiently implemented, authority is less optimally implemented, facilities are sufficiently implemented, implementers' attitudes are less optimally implemented, bureaucratic arrangements are already implemented, incentives are less optimally implemented, enforcement SOPs are already implemented, and fragmentation (division of responsibilities) is already implemented. Supporting factors include consistent provision of appeals to road users and the existence of regulations prohibiting smoking while driving. Meanwhile, inhibiting factors include the lack of socialization regarding the prohibition of smoking while driving, inadequate facilities for monitoring violations, and the absence of sanctions.

This study concludes that the policy implementation still requires strengthening across all variables to run more effectively. Therefore, it is recommended that the Traffic Unit of the Hulu Sungai Utara Police Resort consistently improve socialization and law enforcement, that the public increase compliance with traffic regulations, and that the government support the provision of traffic monitoring facilities and infrastructure to ensure road safety in Amuntai City.